

**Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan Pemerintah kota Batu
Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin
Anggaran Di Kantor Kelurahan Dadaprejo Kota Batu**



**Disusun Oleh:
SYAHRIR YUNUS
NIM 2014110164**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2021**

RINGKASAN

Tujuan membahas penelitian ini agar mengetahui apakah tata kelola pengalokasian dana umum di Kantor Kelurahan Dadaprejo Kota Batu telah sesuai dengan dengan landasan model akuntabel, transparan, partisipatif, tertib serta disiplin. Kualitatif dipilih sebagai metode dalam analisis penelitian ini. *Research* ini menjadikan data priben juga sekunder sebagai sumber data. Kantor Kelurahan Dadaprejo Kota Batu sebagai tempat yang dipilih peneliti untuk melakukan *research*. Hasil *research* ini mengemukakan bahwa tata kelola pengalokasian dana umum di Kantor Kelurahan Dadaprejo Kota Batu secara keseluruhan mulai dari transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin dinilai cukup baik. Ini dibuktikan dengan tata kelola DAU selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, karena pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparan, akuntabel, adil, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran. Dimana Pemerintah kelurahan Dadaprejo selalu terbuka dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat tentang laporan keuangan sehingga seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan adanya Dana Alokasi Umum. Pemerintah Kelurahan Dadaprejo selalu melibatkan masyarakat agar segala yang berhubungan dengan Laporan Keuangan diketahui oleh semua Masyarakat Kelurahan Dadaprejo Kota Batu

Kata Kunci : Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Umum, Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya peningkatan tuntutan warga atas penyelenggara pemerintahan yang baik (*good governance government*), sudah mendesak pemerintahan pusat serta pemerintahan wilayah buat mempraktikkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas bisa dimaksud selaku wujud kewajiban dan bentuk tanggung jawab terhadap penerapan tujuan organisasi dalam mencapai tujuan dan target yang tadinya, lewat sesuatu model tanggung jawab yang dilakukan secara berkala (Mardiasmo, 2014; Hermanto et, angkatan laut(AL), 2021).

Semenjak masa Reformasi, tuntutan warga supaya organisasi zona publik tingkatkan transparansi serta akuntabilitas publik dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan terus menjadi banyak diungkapkan. Buat menanggapi tuntutan publik, pemerintah melaksanakan reformasi manajemen keuangan negeri dengan menetapkan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negeri, antara lain UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negeri, serta UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negeri. UU No. 17 tahun 2003 mengharuskan gubernur/ bupati/ walikota buat mengantarkan laporan pertanggungjawaban penerapan APBD berbentuk laporan keuangan, dimana wujud serta isinya disusun serta ditampilkan cocok dengan yang ada (Renowijoyo, 2010).

Proses laporan keuangan zona publik menjadikan keagenan sebagai dasar teori. Aparat pemerintah berperan selaku objek memiliki wajib

menyediakan data yang berguna untuk subjek data yang berperan selaku prinsipal dalam memperhitungkan akuntabilitas serta pembuatan putusan. Usaha nyata buat wujudkan transparansi dari akuntabilitas kelola uang pemerintah, baik pusat ataupun wilayah merupakan mengantarkan LPJ berbentuk laporan penggunaan uang. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan wajib cocok dengan PP no 71 tahun 2010 (Handayani, 2015).

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Wilayah(LKPD) wajib berguna serta cocok dengan objek yang dituju, oleh sebab itu data akuntansi yang ada di pada LKP wilayah wajibenuhi sebagian ciri kualitatif berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Dimana dijabarkan bahwa ada 4 poin standar pada akuntansi di pemerintahan, diantaranya adalah:, 1) Relevan/Rasional, 2) Bijak/Andal, 3) dapat Dibandingkan, 4) mudah paham. bila tidak penuh hingga hendak menyebabkan kerugian pemerintah wilayah, kemampuan kerugian pemerintah wilayah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidaktepatan, ketidakefisienan, dan juga ketidakefektifan.

Salah satu perihal yang pengaruhi mutu data laporan keuangan pemerintah Wilayah ialah sistem pengendalian intern. Model pengendalian intern dibagi antara kebijakan maupun prosedur dimana diterapkan demi pencapaian sasaran menjamin ataupun sediakan laporan keuangan yang profesional dan menjamin dipatuhinya peraturan perundang- undangan yang ada. BPK(Tubuh Pemeriksa Keuangan) sudah melaksanakan audit atas LKPD(Laporan Keuangan Pemerintah Wilayah) sepanjang 5 tahun, dari tahun 2009- 2013 atas 456 LKPD tahun 2013, hasil penilaian oleh BPK

menampilkan kalau LKPD yang mendapatkan opini WTP (Normal Tanpa Pengecualian) serta WDP (Normal Dengan Pengecualian) pada biasanya mempunyai pengendalian intern sudah mencukupi. Ada pula LKPD, yang mendapatkan opini TW (Tidak Normal) serta TMP (Tidak Melaporkan Komentar) membutuhkan revisi pengendalian intern dalam perihal kebijakan data yang ditampilkan pada laporan keuangan. Masih banyak opini TW serta TMP yang diberikan oleh BPK menampilkan daya guna SPI (Sistem Pengendalian Intern) pemerintah wilayah belum maksimal. Beberapa permasalahan pada sistem ini antara lain pencatatan yang tidak akurat/tidak diaudit, proses penataan laporan yang tidak sesuai, keterlambatan penyampaian laporan, sistem data akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai, serta sistem data akuntansi dan pelaporan Data dan kualitas data yang kurang. Belum didukung oleh sumber daya manusia (human energy sources), tetapi mencukupi.

Keberhasilan menyusun laporan keuangan yang bermutu tidak cuma ditetapkan oleh kompetensi SDM serta sistem pengendalian intern saja. Aspek pemanfaatan teknologi pula berfungsi dalam data laporan keuangan. PP No. 56 Tahun 2005 tentang sistem Data Keuangan Melaporkan pemerintah pusat serta pemerintah wilayah berkewajiban buat meningkatkan serta menggunakan kemajuan teknologi data buat tingkatkan keahlian mengelola keuangan.

Mengacu pada penjabaran diatas, maka peneliti tertarik mengkaji terkait “Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan Pemerintah Kota

Batu Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran Di Kantor Kelurahan Dadaprejo Kota Batu” (**Studi Kasus**).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengelolaan DAU Tambahan Kota Batu di Kelurahan Dadaprejo telah memenuhi Asas Transparansi?
2. Apakah pengelolaan DAU Tambahan Kota Batu di Kelurahan Dadaprejo telah memenuhi Asas Akuntabel?
3. Apakah pengelolaan DAU Tambahan Kota Batu di Kelurahan Dadaprejo telah memenuhi Asas Partisipatif?
4. Apakah pengelolaan DAU Tambahan Kota Batu di Kelurahan Dadaprejo telah memenuhi Asas Tertib?
5. Apakah pengelolaan DAU Tambahan Kota Batu di Kelurahan Dadaprejo telah memenuhi Asas Disiplin?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan Dana Alokasi Umum di Kantor Kelurahan Dadaprejo telah sesuai dengan asas transparansi.
2. Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan Dana Alokasi Umum di Kantor Kelurahan Dadaprejo telah sesuai dengan asas akuntabel.
3. Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan Dana Alokasi Umum di Kantor Kelurahan Dadaprejo telah sesuai dengan asas partisipatif.
4. Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan Dana Alokasi Umum di Kantor Kelurahan Dadaprejo telah sesuai dengan asas tertib.

5. Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan Dana Alokasi Umum di Kantor Kelurahan Dadaprejo telah sesuai dengan asas disiplin.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam bidang akuntansi keuangan, khususnya mengenai konsep-konsep dalam pengelolaan Dana alokasi umum yang berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin agar bisa mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik dalam instansi Kantor kelurahan Dadaprejo Kota batu.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan sebagai bahan referensi peneliti lain yang meneliti hal yang Sama

3. Bagi Kantor Kelurahan Dadaprejo Kota Batu

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan pemikiran yang bermanfaat bagi Kantor kelurahan Dadaprejo Kota Batu guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan anggaran Dana Alokasi Umum dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W. (2010). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Akuntansi dan Manajemen*, 69-80.
- Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi III*. Jakarta: Erlangga.
- Creswell. (2011). *Key Issues of Accounting Information Quality Management: Australia Case Studies* .
- Handayani, B. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Vol 7 No.2 . *Dinamika Akuntansi* .
- Harvesi. (2011). Standar for Internal Control In New York state Governmant .
- Hermanto, Suhendri, H, Iriani, NI. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Keagamaan pada Gereja GPDI Gloria Malang, *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, Vol 10 (1): 21 - 38
- Hutapea. (2014). *Kompetensi Plus* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indriasari, & Nahartyo, E. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Infoemasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai infomasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah . *Nasional Akuntansi XI*.
- Jurnali, & Supomo, B. (2014). Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaaaatan TI Terhadap Kinerja Akuntansi Publik . *Riset Akuntansi Indonesia*.

- Laudon. (2017). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah . *e-journal SI AK Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2014). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Givernance. Vol 1 No.1. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moloeng. (2014). Anaisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Renowijoyo, M. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Organesai Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Siagin, & Sondang. (2011). *Kiat Meningkatkan Aktivitas Kerja* . Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualittif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*.
- Sukmaningrum. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah . *Skripsi Universitas Diponegoro*.

Warisno. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pamarintahan Provinsi Jambi.

Tesis Medan: Universitas Sumatra Utara.

Winidyaningrum. (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan